

# **RENCANA KERJA TAHUN 2017**



**KECAMATAN KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL  
2017**

## KATA PENGANTAR

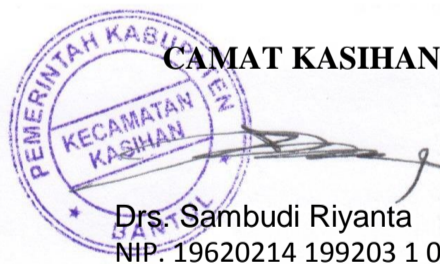
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Dinas, Badan, Kecamatan serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Kasihan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia.

RENJA SKPD Kecamatan Kasihan Tahun 2017 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kasihan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2017. Adapun berhasil dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Dengan adanya Dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan berserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada SKPD Kecamatan Kasihan yang akhirnya mampu mewujudkan VISI dan MISI Kecamatan Kasihan.

Kami menyadari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kasihan masih banyak kekurangannya oleh karena itu kami mohon masukan dari Stakeholder baik dari Pemerintah Kabupaten Bantul maupun Dinas Instansi lainnya serta pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas perencanaan kegiatan yang strategis Kecamatan Kasihan dimasa yang akan datang.

Kasihan ,            Januari 2017

  
**CAMAT KASIHAN**  
Drs. Sambudi Riyanta  
NIP. 19620214 199203 1 006

## Daftar isi

<b>I.</b>	Halaman Judul .....	i
<b>II.</b>	Kata Pengantar .....	ii
<b>III.</b>	Daftar Isi .....	iii
<b>IV.</b>	BAB I Pendahuluan .....	1
<b>V.</b>	Latar Belakang .....	1
<b>VI.</b>	Landasan Belakang .....	2
<b>VII.</b>	Maksud Dan Tujuan .....	3
<b>VIII.</b>	Sistematika Penulisan .....	4
<b>IX.</b>	BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu.....	7
<b>X.</b>	Realisasi Program Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja .....	7
<b>XI.</b>	Realisasi Program Yang Telah Memenuhi Target Kinerja .....	9
<b>XII.</b>	Faktor Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Program/ Kegiatan .....	11
<b>XIII.</b>	Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program SKPd.....	11
<b>XIV.</b>	Kebijakan Perencanaan Dan Pelanggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Penyebab Berikut .....	12
<b>XV.</b>	Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kasihan.....	13
<b>XVI.</b>	Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD .....	14
<b>XVII.</b>	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/ Renstra SKPD .....	16
<b>XVIII.</b>	Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat .....	17
<b>XIX.</b>	Review Usulan Program Dan Kegiatan Kecamatan Kasihan Tahun 2017 .....	18
<b>XX.</b>	BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan .....	19
<b>XXI.</b>	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	19
<b>XXII.</b>	Tujuan Dan Sasaran Rencana Kinerja Tahun 2017 .....	19
<b>XXIII.</b>	Program Dan Kegiatan Tahun 2017 .....	20
<b>XXIV.</b>	BAB IV Penutup .....	21
<b>XXV.</b>	Lampiran .....	22

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kasihan Tahun 2017, pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul untuk periode 1 (satu) tahun, yakni tahun 2017. Rencana Kerja ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 1 (satu) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul 2016 – 2021, Rencana Strategis Kecamatan Kasihan Tahun 2016-2021 yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan dilantikannya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bantul masa bhakti 2016 – 2021, maka visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Bantul.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Bantul 2016 – 2021 yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Bantul yang sehat, Cerdas dan sejahtera berlandaskan nilai – nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah NKRI ”***

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021, pada tahun 2016 telah memasuki tahun pertama dalam implementasinya. RKPd Tahun 2017 menjadi rencana tahun kedua RPJMD 2016-2021. Proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Selanjutnya Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Renja SKPD Kecamatan Kasihan

Tahun 2017 merupakan bagian dari RKPD dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan tahunan SKPD Kecamatan Kasihan.

Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun mendatang akan makin mendekat pada tataran clean government dan good governance.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2017 ini mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

- a. Undang-Undang nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1951;
- b. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014;
- f. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025);
- g. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

- h. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD ) Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025;
- l. Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Kecamatan Kasihan disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJM Daerah Kabupaten Bantul dan Renstra Kecamatan Kasihan untuk jangka waktu satu tahun ke depan dan sebagai pedoman

dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Kasihan adalah :

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan.
- b. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Kecamatan Kasihan pada tahun 2017 yang akan dibiayai oleh APBD II.
- c. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada tahun 2017 kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah.
- d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu satu tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Kasihan Tahun 2017 yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Kasihan dan Pemerintah Desa se Kecamatan Kasihan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan ini terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Kasihan Tahun 2016**

- 2.1.1 Realisasi Program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- 2.1.2 Realisasi Program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
- 2.1.3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain :
- 2.1.4 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program SKPD
- 2.1.5 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi penyebab tersebut.

### **2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD**

### **2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD**

### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD**

### **2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kinerja Tahun 2017**

3.2.1 Tujuan

3.2.2 Sasaran

### **3.3 Program Dan Kegiatan Tahun 2017**

3.3.1. Program



3.3.2. Kegiatan

**3.4 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan**

**BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Kasihan Tahun 2016

RENSTRA Kecamatan Kasihan disusun untuk periode tahun anggaran 2016 s/d 2021. Dalam periode tersebut, setiap tahunnya disusun RENJA SKPD sebagai upaya merealisasikan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut. Dalam Renja SKPD kecamatan Kasihan terdapat 21 (dua puluh satu) program kerja yang dibagi pada 48 (empat puluh delapan) kegiatan kerja, sebagaimana diuraikan dalam table berikut :

Tabel 1

Program dan Kegiatan Kecamatan Kasihan Tahun 2016

No.	Program	Kegiatan	Persentase
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan jasa surat menyurat</li><li>2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik</li><li>3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</li><li>4. Penyediaan jasa administrasi keuangan</li><li>5. Penyediaan jasa kebersihan kantor</li><li>6. Penyediaan jasa alat tulis kantor</li><li>7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</li><li>8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</li><li>9. Penyediaan bahan logistic kantor</li><li>10. Penyediaan makanan dan minuman</li><li>11. Rapat-rapat bkoordinasi dann konsultasi keluar daerah</li><li>12. rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</li></ol>	

02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</li> <li>2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</li> <li>3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>4. Penghadaan perlatan dan perlengkapan kantor</li> </ol>	
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</li> </ol>	
04.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan public dibidang kependudukan</li> </ol>	
05.	Program Pengembangan data/Informasi/Statistik daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan profil desa, monografi kecamatan</li> </ol>	
06.	Program Pengembangan Nilai Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelestraian dan aktualisasi adat budaya daerah</li> </ol>	
07.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian keamanan lingkungan</li> <li>2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan</li> </ol>	
08.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan data dan penanganan masalah kemiskinan</li> </ol>	
09.	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif UKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sarana promosi hasil produksi</li> <li>2. Moonitoring, evaluasi dan pelaporan</li> <li>3. Pendampingan OVOP</li> </ol>	
10.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyhakit menular dan wabah</li> <li>2. Peningkatan kesehatan masyarakat</li> </ol>	
11.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring, evaluasi daan pelaporan</li> </ol>	
12.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan nkesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa</li> </ol>	
13.	Program Pen ingkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatn daerah</li> </ol>	

14.	Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Desa	1. Penyelenggaraan lomba desa 2. Penyelenggaraan lomba RT	
15.	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	1. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	
16.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah 2. Pendampingan pemilihan lurah dan pamong desa 3. Penyusunan perda dan aturan pelaksanaan perda kelembagaan desa 4. Pendampingan permasalahan desa	
17.	Program Peningkatan Peran Serata dan Kesetaraan Gender Dalam pembangunan	1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	
18.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1. Pembinaan satuan keamanan lingkungan dimasyarakat	
19.	Program Perencanaan Pembangunan daerah	1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kegiatan layanan publik	
20.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Pengawasan produk hukum pemerintah desa	
21.	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	1. Monitoring di tingkat kecamatan 2. Pelaksanaan rakorpem desa 3. Pelayanan terpadu (PATEN) ditingkat kecamatan 4. Monitoing pembangunan dan lingkungan hidup	

Dari masing-masing kegiatan tersebut didapat pencapaian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dibagi menjadi 12 (dua belas) kegiatan kerja dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 70,48%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dibagi menjadi 4 (empat) kegiatan dengan persentase pencapaian Tingkat realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 89,87%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini hanya terdapat 1 (Satu) kegiatan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 0%.

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program ini hanya terdapat 1 (Satu) kegiatan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 13,08%.

5. Program Pengembangan data/Informasi/Statistik daerah

Program ini hanya terdapat 1 (Satu) kegiatan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 60,19%.

6. Program Pengembangan Nilai Budaya

Program ini hanya terdapat 1 (Satu) kegiatan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 92,39%.

7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program ini di bagi menjadi 2 (dua) kegiatan dengan realisasi persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 95,02%.

8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program ini hanya terdapat 1 (Satu) kegiatan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 100%.

9. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif UKM

Program ini di bagi menjadi 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 91,77%.

10. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini di bagi menjadi 2 (dua) kegiatan dengan realisasi persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 63,43%.

11. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program ini hanya terdapat 1 (Satu) kegiatan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 0%.

12. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini hanya terdapat 1 (Satu) kegiatan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 98,07%.

13. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

Program ini hanya terdapat 1 (Satu) kegiatan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 12,02%.

14. Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Desa.

Program ini di bagi menjadi 2 (dua) kegiatan dengan realisasi persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 69,16%.

15. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Program ini hanya terdapat 1 (Satu) kegiatan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 100%.

16. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program ini di bagi menjadi 4 (empat) kegiatan dengan realisasi persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 71,18%.

17. Program Peningkatan Peran Serata dan Kesetaraan Gender Dalam pembangunan.

Program ini hanya terdapat 1 (Satu) kegiatan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 98,07%.

18. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Program ini hanya terdapat 1 (Satu) kegiatan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 100%.

19. Program Perencanaan Pembangunan daerah

Program ini di bagi menjadi 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 63,96%.

20. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program ini hanya terdapat 1 (Satu) kegiatan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 100%.

21. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan

Program ini di bagi menjadi 4 (empat) kegiatan dengan realisasi persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2016 sebesar 70,33%.

**2.1.1. Realisasi Program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :**

Sesuai dengan hasil yang didapat dari perbandingan antara Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kasihan Tahun 2016, dengan

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kasihan Tahun 2016 tidak didapati realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran dari yang direncanakan.

Realisasi program / kegiatan di Kecamatan Kasihan pada dasarnya semuanya berjalan baik, Namun demikian ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena berbagai hal antara lain :

- a. Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dengan indicator :
  - 1) Belanja alat tulis kantor dengan realisasi mencapai 0%
  - 2) Belanja makanan dan Minuman pelaksanaan kegiatan dengan realisasi mencapai 76%.
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan :
  - 1) Penyediaan jasa surat menyurat, dengan indicator :
    - i. Belanja perangko, materai dan benda Pos dengan realisasi mencapai 47%.
  - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Dengan indicator :
    - i. Belanja telepon dengan realisasi sebesar 72%.
    - ii. Belanja listrik dengan realisasi 90%.
  - 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan indicator :
    - i. Belanja surat tanda nomor kendaraan dengan realisasi sebesar 52%
  - 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
    - i. Belanja alat tulis kantor dengan realisasi 0%
    - ii. Belanja penggandaan dengan realisasi 0%.
    - iii. Belanja makanan dan minuman rapat dengan realisasi 0%.
  - 5) Penyediaan makanan dan minuman dengan indicator :
    - i. Belanja makanan dan minuman rapat dengan realisasi 63%.
  - 6) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
    - i. Belanja perjalanan dinas ke luar daerah dengan realisasi sebesar 80%

- 7) Rapat-rapat koordinasi ndan konsultasi ke dalam daerah
  - 8) Belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan realisasi sebesar 98%
- c. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah , dengan Kegiatan:
- 1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan indicator :
    - i. Belanja alat tulis denmngan realisasi sebesar 0%.
    - ii. Belanja bahan bakar minyak / gas dengan realisasi sebesar 0%
    - iii. Belanja cetak dengan realisasi sebesar 0%
    - iv. Belanja penggandaan dengan realisasi sebesar 0%
    - v. Belanja makanan dan m inuman rapat dengan realisasi sebesar 0%
- d. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur pemerintahan dengan Kegiatan:
- 1). Pelaksanaan Rakorpem Desa desa dengan indicator :
    - i. Belanja makanan dan minuman rapat dengan realisasi 79%.
    - ii. Jasa narasumber demngan realisasi sebesar 0%.
  - 2). Pelayanan terpadu di Kecamatan ( PATEN)
    - i. Uang lembur ASN dengan realisasi sebesar 92%.
    - ii. Belanja makanan dan minuman lembur 91%
- e. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan Kegiatan:
- 1). Pendampingan pemilihan lurah dan pamong desa dengan indikator :
    - i. Belanja makanan dan minuman rapat dengan realisasi sebesar 79%.
  - 2). Pendampingan permasalahan pemerintahan desa
    - i. Belanja alat tulis kantor dengan realisasi sebesar 0%
    - ii. Belanja makanan dan minuman rapat dengan realisasi sebesar 29%.
  - 3). Penyusunan monografi desa dan profil kecamatan
    - i. Belanja bahan bakar minyak/gas dengan realisasi sebesar 47%.
    - ii. Belanja penggandaan dengan realisasi sebesar 51%.
    - iii. Belanja makanan dan minuman rapat 71%.



### **2.1.2. Realisasi Program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :**

Secara keseluruhan realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran seperti yang direncanakan, hal ini terlihat dari hasil perbandingan antara target kinerja pada Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kasihantelah sesuai dengan realisasi yang ditunjukkan dari Realisasi target kinerja pada Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah dan Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kasihan Tahun 2016 dan untuk Tahun 2017 belum dapat dibandingkan karena baru berjalan. Secara ringkas hasil/realisasi kinerja program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan Kegiatan:

- 1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan indikator kinerja yang dicapai adalah :
  - i. Terksananya belanja ATK, mencapai 100 %.
  - ii. Terlaksananya belanja bahan bakar minyak , mencapai (100 %).
  - iii. Terlaksananya belanja cetak, mencapai 100%.
  - iv. Terlaksananya belanja sewa tenda, mencapai 100 %.
  - v. Terlaksananya belanja makan minum rapat, mencapai 100 %.
  - vi. Terlaksananya jasa untuk narasumber/moderator, mencapai 100 %.

b. Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan,dengan Kegiatan:

- 1). Pengendalian keamanan lingkungan dengan indikator kinerja yang dicapai sebagai berikut :
  - i. Terlaksananya belanja makan dan minum pelaksanaan kegiatan, mencapai 100 %.
- 2). Monotoring, evaluasi dan pelaporan
  - i. Terlaksananya belanja sewa sarana mobilitas darat, mencapai 100 %.

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan:

1). Penyediaan jasa Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / Operasional indikator kinerja yang dicapai adalah :

i. Honorarium pengelola keuangan dan barang mencapai 100%.

d. Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur, dengan Kegiatan:

1). Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas /Operasional dengan indikator kinerjanya :

i. Belanja bahan bakar minyak/gas yang mencapai 100%.

ii. Belanja jasa servis yang mencapai 100%.

iii. Belanja penggantian suiku cadang yang mencapai 100%.

e. Peningkatan kualitas Penataan Peraturan Perunda-Undangan, dengan Kegiatan:

1). Pengawasan produk hukum pemerintahan desa dengan indikator kinerjanya :

i. Belanja lembur ASN yang mencapai 100%.

ii. Belanja Penggandaan yang mencapai 100%.

iii. Belanja makanan dan minum rapat yang mencapai 100%.

iv. Jasa nara sumber / moderator / tenaga ahli yang mencapai 100%..

f. Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan, dengan Kegiatan:

1) Pelaksanaan Rakorpem Desa dengan indikator kinerjanya :

i. Belanja Penggandaan mencapai 100%.

g. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan indikator :

1). Pendampingan pemilihan Lurah dan Pamong desa

i. Belanja alat tulis kantor mencapai 100%.

ii. Belanja cetak mencapai 100%

iii. Belanja penggandaan mencapai 100%.

iv. Belanja sewa meja kursi mencapai 100%.

v. Belanja sewa tenda mencapai 100%.

- vi. Belanja sewa sound system mencapai 100%.
- vii. Belanja makanan dan minuman kegiatan mencapai 100%.

2). Pendampingan permasalahan pemerintahan desa

- i. Belanja penggandaan mencapai 100%.

**2.1.3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain :**

- 1) Ada beberapa program yang diampu oleh Dinas Instansi Kabupaten sehingga beberapa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- 2) Adanya efisiensi untuk program rutin antara lain Program administrasi perkantoran dan Program sarana Prasarana.
- 3) Masih kurang lengkapnya sarana dan prasarana penunjang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang diantaranya adalah:

- ✓ Untuk pelayanan terpadu kecamatan sangat tidak memenuhi standar karena terlalu sempit sehingga banyak masyarakat yang menunggu diluar sehingga ketika dipanggil tidak mendengar dan akhirnya menghambat pelayanan selanjutnya.

**2.1.4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program SKPD**

Salah satu bentuk pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD adalah dengan melihat implikasi yang timbul dalam proses pencapaian target program SKPD, dengan demikian akan dapat diukur seberapa persentase perkiraan keberhasilan program SKPD itu diserap di masyarakat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Kecamatan Kasihan antara lain :

- a. Kemampuan aparatur pemerintah kecamatan dalam hal mobilisasi, sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan patroli terpadu, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di desa, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan UKS dan kegiatan lain yang memerlukan mobilisasi aparatur.
- b. Meningkatnya kebutuhan gedung kantor, peralatan gedung kantor yang representatif, sebagai implikasi dari adanya personil non PNS seperti TKSK,

Pendamping Kemiskinan, PKH, UPK-PNPM, yang berkantor di kecamatan sebagai bentuk pelaksanaan dan pencapaian program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, membuat kebutuhan akan ruang/gedung kantor dan peralatan gedung kantor seperti komputer, meja, kursi menjadi meningkat.

- c. Meningkatnya kebutuhan personil aparatur yang cakap komputer, dikarenakan jumlah aparatur di kecamatan dirasa kurang untuk memenuhi pencapaian target kinerja.

#### **2.1.5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi penyebab tersebut.**

Untuk mengatasi permasalahan yang menyebabkan dampak **(benefit)** yang diharapkan dari target kinerja program/kegiatan tidak tercapai antara lain dengan menetapkan kebijakan berdasarkan sasaran yaitu :

- a. Untuk kegiatan yang tidak mencapai target langsung diadakan perubahan di anggaran perubahan sehingga tingkat realisasi pencapaian anggaran bisa lebih meningkat. Namun karena sesuatu hal yang berkenaan dengan penundaan anggaran sehingga ada kebijakan tidak dilakukan perubahan yang pada akhirnya berakibat pada tingkat pencapaian anggaran yang rendah.
- b. Karena terjadi penghematan anggaran terutama untuk Program pelayanan administrasi perkantoran yang bisa menghemat sekitar 29% dari jumlah total anggaran yang tersedia, dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang bisa menghemat anggaran sekitar 10%.

Note : Untuk lebih jelasnya tabel realisasi kinerja terlampir pada lampiran 1.

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KASIHAN

Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi penilaian dan sorotan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan menjadi harapan dan keinginan masyarakat dengan mudah, sederhana, biaya murah dan tepat waktu.

Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan system pelayanan di kecamatan yang dapat memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik ini dapat menjadi indikator kinerja kecamatan.

Pelayanan yang diselenggarakan kecamatan Kasihan di tahun 2016 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2

### 1) Pelayanan Administrasi Kependudukan

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah	Satuan	Ket.
1.	Rekomendasi pengurusan KTP	5.600	Dokumen	
2.	Rekomendasi pengurusan KK	5.997	Dokumen	
3.	Rekomendasi pindah masuk penduduk	2.217	Dokumen	
4.	Rekomendasi pindah keluar penduduk	1.929	Dokumen	
5.	Legalisasi FC KTP/KK Urusan administrasi kependudukan	2.037	Dokumen	
	Jumlah	17.780	Dokumen	

Tabel 3

### 2) Pelayanan Urusan Perijinan

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah	Satuan	Ket.
1.	Rekomendasi HO ( Ijin Gangguan)	190	Dokumen	
2.	Rekomendasi IMB ( Ijin Mendirikan Bangunan)	320	Dokumen	
3.	Rekomendasi Ijin Keramaian/Penghelatan	107	Dokumen	
4.	Rekomendasi Nikah Non Muslim dan Dispensasi Nikah	132	Dokumen	
	Jumlah	749	Dokumen	

Tabel 4

## 3) Pelayanan Urusan Non Perijinan

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah	Satuan	Ket.
1.	Rekomendasi SKTM (surat keterangan tidak mampu)	589	Dokumen	
2.	Rekomendasi SKM/Jamkesda dll	575	Dokumen	
3.	Rekomendasi bantuan – bantuan	77	Dokumen	
4.	Legalisasi KTP dan KK urusan Non Perijinan	600	Dokumen	
	Jumlah	1.841	Dokumen	

**2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, Kecamatan Kasihan telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. Beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Sebagai SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, ruang lingkup tugas Kecamatan Kasihan mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pendampingan peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian, fasilitasi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Ruang lingkup tugas ini turut mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Kasihan dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Aspek kajian dari sumber daya manusia

Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Sementara jumlah karyawan yang ada dikecamatan kasihan berjumlah 28 orang, dari jumlah tersebut ada 4 orang yang purna tugas di tahun 2017. Kemudian faktor yang memengaruhi secara intern antara lain yaitu motivasi kerja dan kapasitas SDM pegawai Kecamatan Kasihan. Dalam upaya untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja maka diperlukan adanya pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan.

Sementara dari sisi ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan secara optimal.

b. Aspek kajian dari sarana dan prasarana

Kondisi sarana dan prasarana penunjang yang terbatas namun tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat, sehingga dengan kondisi tersebut aparatur Kecamatan Kasihan harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat.

Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini antara lain mencakup kondisi gedung perkantoran terutama untuk pelayanan kecamatan (PATEN) yang terlalu sempit, sehingga perlu untuk direhabilitasi sehingga mencapai standar kelayakan untuk pelayanan, serta ketersediaan alat perkantoran yang memadai untuk menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat.

c. Aspek kajian dari jumlah anggaran

Kondisi sosiologis masyarakat Kecamatan Kasihan yang merupakan daerah penyangga kota Yogyakarta sangat bernuansa perkotaan dengan berbagai kompleksitas dan dinamika yang ada tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang berjalan selama ini tentu belum mampu menyentuh semua kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi ini maka diharapkan adanya dukungan kebijakan anggaran yang memadai untuk menampung kebutuhan masyarakat. Untuk program dan kegiatan pembangunan yang belum tertampung dalam struktur anggaran kecamatan diharapkan dapat tercover oleh SKPD terkait untuk diimplementasikan di wilayah Kecamatan Kasihan.

Dari beberapa aspek kajian permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kasihan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa tantangan yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi peluang. Beberapa tantangan dan peluang yang ada antara lain :

- 1) Posisi Kecamatan Kasihan yang berada di wilayah perbatasan dengan kota, sebagai wilayah penyangga kota maka ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menopang aktifitas warga yang berkarakteristik perkotaan,
- 2) Sebagai kecamatan penyangga kota maka pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga yang berbanding lurus dengan pengurangan angka kemiskinan.

Dari berbagai permasalahan di atas selanjutnya dapat dipetakan isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis sehingga diperoleh output yang lebih aspiratif, mengingat letak kecamatan Kasihan yang sangat strategis di Aglomerasi perkotaan Yogyakarta dan juga termasuk kecamatan yang di lewati Ring Road Yogyakarta;
2. Terdapat sentra-sentra kegiatan untuk mempercepat pertumbuhan , seperti Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi, ( KAJIGELEM ) serta Kawasan Beton, Madukismo dan Niten ( KATONMANTEN )
3. Tersedianya sarana pendidikan yang cukup memadai. ( UMY, UPY dll ).
4. Pemerataan pembangunan fisik untuk meminimalisir disparitas kondisi wilayah pinggiran dengan wilayah pusat perkotaan, sekaligus membuka lapangan pekerjaan dengan memberdayakan warga lokal.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi dan peran serta/kerjasama yang baik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kasihan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Masih lemahnya atau belum optimalnya fasilitasi, koordinasi lintas sector atau lintas seksi hal tersebut terjadi karena :
  - d. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai,
  - e. Etos kerja yang belum terbina secara optimal
  - f. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
  - g. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi Perkantoran
2. Menurunnya kepercayaan terhadap realisasi rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang dapat diakomodir;
3. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu;
4. Masih perlu peningkatan Sumberdaya Manusia serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
5. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan



yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat. Untuk lebih memberikan pelayanan yang benar benar prima pemerintah Kecamatan Kasihan memberlakukan piket pelayanan khusus hari Sabtu, yaitu antara jam 08.00 s.d, jam 11. Pelayanan tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat terbukti dengan banyak masyarakat yang mengurus keperluannya di hari Sabtu.

6. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Kasihan berdasarkan RKPD Kabupaten Bantul sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Bantul yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kasihan.

Untuk lebih jelasnya review Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 dapat dilihat di lampiran ( 3 \* )

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kasihan pada tahun 2015 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;

2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Kasihan maka ketiga hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

**Tabel 2.4**

**REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KASIHAN TAHUN 2017**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Ket.
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Kasihan	Tersediannya Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	83.505.000	
		Kec. Kasihan	Tersediannya makanan dan minuman untuk rapat-rapat konsultasi dan koordinasi selama 12 bulan	43.162.500	
02	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kec. Kasihan	Tersediannya bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas, jasa servis kendaraan bermotor dan tersediannya suku cadang	23.500.000	
		Kec. Kasihan	Tersediannya alat penyimpanan Rak, pengadaan computer dan printer	95.977.280	
		Kec. Kasihan	Tersediannya bahan baku bangunan (tiang bendera) dan jasa tenaga harian lepas untuk tukang, tenaga dan kepala tukang	80.049.500	
		Kec. Kasihan	Tersediannya jasa servis dan suku cadang pemeliharaan peralatan mesin	15.000.000	
03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Kec. Kasihan	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan	54.220.000	
04	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kec. Kasihan	Tersediannya uang lembur PNS dan makan lembur PNS, belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan dan tersediannya belanja pakaian kerja pelayanan	56.765.000	
05	Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kec. Kasihan	Tersediannya belanja pakaian PASKIBRAKA	50.000.000	
		Kec. Kasihan	Tersediannya uang lembur PNS dan makan lembur PNS, alat tulis kantor dan penggandaan Tersediannya makan dan minum rapat dan makan minum pelaksanaan kegiatan	49.515.000	
		Kec. Kasihan	Tersediannya Honor Narasumber dan Moderator, Honor Panitia Gerak jalan massal, Honor pelaksana kegiatan keluarga tangguh Muspika	119.240.000	

			Tersediannya makan dan minum kegiatan gerakjalan massal		
06	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Kec. Kasihan	Tersediannya Jasa Narasumber FKUB, FKDM, FPK dan FKS Tersediannya makan minum rapat FKUB, FKS, FKDM dan FPK Tersediannya Jasa Transport peserta FKUB, FKDM, FPK Tersediannya pakaian Batik Tradisional	95.944.500	

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

##### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kasihan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 3.1.1. Optimalisasi tugas pelayanan kepada masyarakat terutama untuk pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) hal tersebut telah disepakati sebagai Visi Kecamatan Kasihan.
- 3.1.2. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- 3.1.2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,

pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017**

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Kasihan mempunyai *tujuan* : Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan *sasaran* Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Kasihan secara Optimal.

#### **3.2.1. TUJUAN**

Tersedianya dokumen Rencana Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2017. Sebagai pedoman kebijakan penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan SKPD Kabupaten Bantul pada tahun 2017, agar dapat terlaksana secara terencana dan berhasil, bermanfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat serta didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan pemerintahan serta analisis kinerja pelayanan SKPD diatas maka dalam pencapaian kinerja Tahun 2017 mendatang SKPD Kecamatan Kasihan menetapkan sasaran kinerja seperti penjelasan dibawah.

#### **3.2.2. SASARAN.**

Merujuk pada Visi, Misi, Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2017 Kabupaten Bantul maka sasaran yang ditetapkan adalah :

1. Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Masyarakat
2. Peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
3. Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Desa
4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja
5. Pemantapan ketentraman dan ketertiban
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Aparatur

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017**

#### **3.3.1. Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Merujuk pada Renstra Tahun 2016 – 2021 Kecamatan Kasihan, maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2017 terdiri dari 6 (enam) Program yang terdiri dari 12 Kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 768.878.780,- dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Jumlah Dana ( Rp )
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	83.505.000
		2. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	43.162.500
02	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	23.500.000
		2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	95.977.280
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	80.049.500
		4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	15.000.000
03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1. Musrenbang Tingkat Kecamatan	54.220.000
04	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat	56.765.000
05	Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai – Nilai Luhur Budaya Bangsa	50.000.000
		2. Fasilitasi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	49.515.000
		3. Rapat Koordinasi Unsur Muspika	119.240.000
06	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	95.944.500
		Jumlah	766.878.780

### .3.2. Kegiatan

#### I. Program Pelayanan administrasi Perkantoran

No.	Kegiatan	Sasaran
1.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	: Tersediannya Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

2.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	:	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat konsultasi dan koordinasi selama 12 bulan
----	---	---	---

## II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No.	Kegiatan	Sasaran
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	: Tersedianya bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas, jasa servis kendaraan bermotor dan tersedianya suku cadang
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	: Tersedianya alat penyimpanan Rak, pengadaan computer dan printer
3	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	: Tersedianya bahan baku bangunan (tiang bendera) dan jasa tenaga harian lepas untuk tukang, tenaga dan kepala tukang
4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	: Tersedianya jasa servis dan suku cadang pemeliharaan peralatan mesin

## III. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa .

No	Kegiatan	Sasaran
01	Musrenbang Tingkat Kecamatan	: Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan

## IV. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

No.	Kegiatan	Sasaran
1.	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	: Tersedianya uang lembur PNS dan makan lembur PNS, belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan dan tersedianya belanja pakaian kerja pelayanan

## V. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan

No.	Kegiatan	Sasaran
1	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai – Nilai Luhur Budaya Bangsa	: Tersedianya belanja pakaian PASKIBRAKA
2	Fasilitasi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	: Tersedianya uang lembur PNS dan makan lembur PNS, alat tulis kantor dan penggandaan Tersedianya makan dan minum rapat dan makan minum pelaksanaan kegiatan
3	Rapat Koordinasi Unsur Muspika	: Tersedianya Honor Narasumber dan Moderator, Honor Panitia Gerak jalan

		massal, Honor pelaksana kegiatan keluarga tangguh Muspika Tersediannya makan dan minum kegiatan gerakjalan massal
--	--	---

**VI. Program Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**

No	Kegiatan	Sasaran
01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	: Tersediannya Jasa Narasumber FKUB, FKDM, FPK dan FKS Tersediannya makan minum rapat FKUB, FKS, FKDM dan FPK Tersedianya Jasa Transport peserta FKUB, FKDM, FPK Tersediannya pakaian Batik Tradisional

Selanjutnya untuk perincian program kegiatan serta pagu anggaran dapat dilihat pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang terdapat pada lampiran.( 4 \* )

## BAB IV PENUTUP

Demikian Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Tahun 2017 ini kami susun. Sesuai dengan Perda No. 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Renja ini disusun merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021, Renstra Kecamatan Kasihan Tahun 2016 – 2021, serta melihat pada isu-isu strategis Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Kasihan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kasihan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Kasihan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Bantul secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2017, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

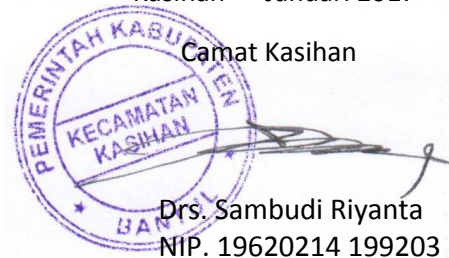
1. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi rencana kerja ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam rencana kerja yang sudah dibuat;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat;



3. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Kasihani Januari 2017

Camat Kasihan



Drs. Sambudi Riyanta  
NIP. 19620214 199203 1 006